

**PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN MIKRO KREDIT BERBASIS
KOMUNITAS SEBAGAI UPAYA PENANGANAN KEMISKINAN
PERKOTAAN DI KELURAHAN PASAR MINGGU KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN**

Oleh

Yessilia Osira

Jurusan Kesejahteraan Sosial Universitas Bengkulu

ABSTRAK

The economic crisis in Indonesia that has occurred since 1997 makes the number of the poor increases. The indications could be found in the increasing members of the unemployed and of workers that loose the their jobs and also the weak power of publics buyers. To handle this phenomena, government or any private volunteer should motivate and activate society to develop Micro Credit Programe. One of the areas that have the Micro Credit Institute is Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu in Jakarta Selatan. But the achievement is not yet satisfied. So that working harder should be taken into action by way of making the Institute more develop and more active. To make the institute better and more beneficial we should Increase the capital and enlarge the area of the Institute network, Develop the forum initiative and enlarge the participation of the society in the Micro Credit Institute and Make The Networking Program in order the Institute to be more productive and more collaborated. In this case the purpose is to make The Institute productive to increase the social services and to develop The Institute in many fields of activities either with the government or private. The Success of this work depends on how far this activity should cover this social group. By way of social map (data) we could analyze the condition of the social life, geographically, demographically, economically and culturally. Briefly, social data will show the problems: the need or necessity as well as the potential and the capability of the society that could be use (be taken) to solve the social problems. Our work will be effective, efficient, could meet the social needs and this will be surely supported by the society. Attention for the Stakeholders is that the achievement of our goal depends on and be influenced by :1) The local characteristic and the tradition of the society, 2) The Comprehensive action taken not only in the Micro Credit Institute, but also in the other activities such as : to promote the understanding of democracy, to increase the participation of society in political matters, to make the social welfare more better and other activities connected with the social needs, 3) the continuous and systematical program to anticipate the unexpected problems that may occur later.

Keywords: micro credit, poverty

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi yang melanda dunia, termasuk Indonesia tahun 1997 dan tahun 2010 telah menyebabkan permasalahan pengangguran dan penduduk miskin. Data BPS (1999) menunjukkan bahwa jumlah pengangguran nasional menjadi 15,4 juta jiwa dan jumlah penduduk miskin menjadi 47,9 juta orang atau sekitar 23,5% dari keseluruhan

penduduk Indonesia, terdiri 15,6 Juta orang di kawasan perkotaan dan 32,83 juta orang di kawasan pedesaan. Sementara data BPS Maret 2011, menyebutkan bahwa penduduk miskin berjumlah 30,02 juta orang, meliputi 11,05 juta orang penduduk miskin perkotaan, dan 18,97 juta orang penduduk miskin pedesaan. Secara umum, krisis tersebut telah menyebabkan (1) menurunnya daya beli masyarakat, (2) meningkatnya jumlah pengangguran, (3) meningkatnya korban PHK (pemutusan hubungan kerja). Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin, baik yang berada di wilayah pedesaan maupun di wilayah perkotaan.

Dari sudut pandang lain, permasalahan akibat krisis tersebut, telah ikut mendorong terjadinya perubahan paradigma pembangunan. Sekarang berkembang Paradigma “pengembangan masyarakat” sebagai sebuah model baru dalam pembangunan, menggantikan paradigma “sentralistik”. Model ini menekankan pada “desentralisasi” dan “partisipasi” aktif masyarakat sebagai “subyek” pembangunan. Salah satu contoh kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka pengembangan /pemberdayaan masyarakat dalam penanganan kemiskinan adalah adanya kegiatan “micro finance” atau mikro kredit. Untuk pertama kalinya definisi mikro kredit dicetuskan dalam pertemuan The World Summit on Micro Credit di Washington tanggal 2-4 Februari 1997, yang menyatakan bahwa mikro kredit adalah program/kegiatan memberikan pinjaman yang jumlahnya kecil kepada masyarakat miskin untuk kegiatan usaha meningkatkan pendapatan, pemberian pinjaman untuk mengurus diri sendiri dan keluarganya. Model mikro kredit ini telah diterapkan di beberapa negara, antara lain Grameen Bank di Bangladesh, SEWA Bank di India, Bank for Agriculture and Agriculture Cooperatives (BAAC) di Thailand, Rotating Savings and Credit Associations (ROSCAs) hampir ada di setiap Negara dengan berbagai nama dan jenis kegiatan.

Tulisan ini mencoba menjelaskan pentingnya pengembangan kelembagaan mikro kredit berbasis komunitas, sebagai upaya penanganan kemiskinan perkotaan, yang dilakukan di wilayah Kelurahan Pasar Minggu. Dalam penelitian ini, fokus perhatian adalah Kegiatan Mikro Kredit GEMA WARGA yang dilaksanakan di wilayah Kelurahan Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan tujuan mengatasi masalah kemiskinan yang dialami oleh warga masyarakat kelurahan Pasar Minggu.

Pada mulanya di tahun 2001, keanggotaan mikro kredit hanya berjumlah 2 kelompok, masing-masing kelompok berjumlah 10 orang, yang kesemuanya adalah perempuan yang mempunyai usaha. Untuk pengelolaannya mikro kredit ini menggunakan tenaga pendamping dari LSM sebanyak 2 orang sedangkan 2 orang lagi berasal dari masyarakat setempat yang dipersiapkan untuk tenaga tetapnya, dimana untuk insentif dari para pengelola masih disubsidi dari LSM yang bersangkutan. Tahap awal dana di peroleh dari LSM sejumlah 4 juta rupiah (1 orang mendapat Rp.200.000), yang kemudian dana tersebut pada tahun 2002 dikembalikan setelah kegiatan mikro kredit ini dapat mengakses pinjaman dari donor yaitu dari MCI sebanyak 100 juta yang diturunkan secara bertahap. Perkembangan selanjutnya jumlah keanggotaan tercatat pada bulan Oktober 2003 sebanyak 192 terdiri dari 177 perempuan dan 15 orang laki-laki. Demikian juga halnya dengan jumlah pinjaman setiap anggota semakin meningkat. Untuk para pengelola semua berasal dari masyarakat setempat sebanyak 5 orang yaitu 3 orang perempuan dan 2 orang laki-laki yang setiap bulannya diberi insentif dari BOP (Biaya Operasional) Mikro Kredit.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Kegiatan Pengembangan Masyarakat Di Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan tahun 2003 terdapat beberapa kelemahan kegiatan pengembangan masyarakat dalam penerapannya yaitu: 1) Belum menjangkaunya kegiatan pengembangan masyarakat terhadap seluruh komunitas masyarakat miskin di Kelurahan Pasar Minggu, 2) Pemanfaatan modal sosial yang tidak optimal dalam kegiatan pengembangan masyarakat sehingga potensi dan kemampuan warga tidak termanfaatkan. Hal ini ditunjukkan dari pengelola kegiatan telah ditetapkan oleh juklak dan juknis dari pusat (atas) dan bukan dari kesepakatan masyarakat, tidak ada sistem yang menjadikan masyarakat bisa saling membantu, sehingga tanggung jawab sosial kurang, masyarakat kurang memahami program pengembangan masyarakat, keputusan diambil dalam musyawarah yang pesertanya lebih banyak terdiri dari “:elit-elit” pemerintahan kelurahan atau keputusan didominasi oleh pengurus/pengelola kegiatan saja, ikatan dalam kelompok kurang erat karena masyarakat kurang dilibatkan dalam kegiatan (perencanaan, dan evaluasi), 3) Masih kuatnya “eksklusifitas” kelompok-kelompok sosial pada masyarakat, baik kelompok berdasarkan etnis (kelompok Madura, Betawi, Batak dll), kelompok berdasarkan lokasi tempat tinggal (kelompok elit, kelompok kumuh). Hal ini menyisakan jarak atau

kesenjangan sosial ekonomi di antara kelompok-kelompok masyarakat tersebut yang bila tidak diantisipasi dapat menimbulkan ketegangan dan konflik sosial, 4) Pemahaman yang kurang tentang “program pengembangan masyarakat/pemberdayaan” menjadikan mereka memandang bahwa walaupun modal bergulir sangat membantu kehidupannya tetapi mereka tidak mempersiapkan kelanjutan kegiatan sehingga bantuan umumnya digunakan untuk keperluan “konsumsi”, 5) Masyarakat masih menganggap bahwa dana bantuan merupakan dana “hibah” dari pemerintah yang tidak harus dikembalikan

Fenomena pada latar belakang di atas dapat dirumuskan dalam sebuah permasalahan penelitian: “Bagaimanakah pengembangan kelembagaan mikro kredit berbasis komunitas, dalam penanganan golongan miskin perkotaan di kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan?”

Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengembangan kelembagaan mikro kredit berbasis komunitas, dalam penanganan golongan miskin perkotaan di Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Secara khusus tujuan penelitian ini meliputi; 1) Mengkaji pengembangan modal sosial dan jejaring sosial (kelembagaan) berbasis komunitas yang dilakukan oleh kelembagaan Mikro Kredit, 2) Mengkaji pengembangan forum inisiasi publik dan implementasi yang partisipatif, yang dilakukan oleh kelembagaan Mikro Kredit, 3) Menyusun program jejaring usaha produktif dan jejaring kolaboratif untuk menangani golongan miskin perkotaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian aksi (action Research) yaitu suatu penelitian ilmiah yang dilakukan dengan berkolaborasi dengan pihak yang diteliti. Dalam penelitian pengamatan dilanjutkan dengan tindakan konkret.

Penelitian dilakukan pada masyarakat Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Komunitas yang menjadi sasaran penelitian adalah komunitas masyarakat yang tergabung dalam kelembagaan Mikro Kredit Gerakan Mitra Warga. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari Kegiatan Pemetaan Sosial, dan Kegiatan Evaluasi Program Pengembangan Masyarakat di wilayah yang sama.

Persiapan pelaksanaan penelitian dilaksanakan sejak bulan Juni 2003 sampai bulan Februari 2004

Pengumpulan data sekunder yang meliputi monografi kelurahan, profil kelurahan, laporan hasil pemetaan sosial, laporan hasil evaluasi kegiatan pengembangan masyarakat, Gerakan Mitra Warga dan Mikro Kredit dilakukan dengan metode studi literature. Sedangkan pengumpulan data primer tentang bagaimana kelembagaan mikro kredit menjadi kelembagaan yang berbasis komunitas dilakukan melalui metode pengamatan berpartisipasi, wawancara semi terstruktur dan metode action research. Data primer didapatkan dari proses kegiatan mikro kredit, pengelola dan anggota mikro kredit.

Kegiatan penelitian ini sudah dimulai sejak pengumpulan data kegiatan pemetaan sosial. Pemetaan sosial dilakukan untuk melihat komposisi penduduk, untuk memahami potensi, sumber serta masalah yang dialami oleh masyarakat. Pemetaan sosial ini dilakukan dengan metode survey, dan diskusi. Selanjutnya dari evaluasi kegiatan pengembangan masyarakat dilakukan melalui wawancara, dan diskusi.

Penyusunan program meliputi langkah-langkah identifikasi masalah, identifikasi potensi dan sumber, rencana pemecahan masalah, pelaksanaan pemecahan masalah, evaluasi dan tindak lanjutnya. Kesemua langkah-langkah ini dilakukan secara bersama-sama (seluruh stake holders) melalui metode/teknik FGD (focus group discussion), MPA (Metode Participatory Assessment) dan TOP (technology of participation),

Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif dan kuantitatif. Analisa data kuantitatif dilakukan dengan menampilkan tabel-tabel frekuensi dan angka-angka, sedangkan analisa data kualitatif ditampilkan melalui matrik, skema dan deskripsi tentang materi penelitian yang didasarkan dari perbandingan antara fakta (data) dengan tinjauan teoritis penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peta Sosial Kelurahan Pasar Minggu

Kegiatan Mikro Kredit Gerakan Mitra Warga (GEMA WARGA) ini berada di wilayah Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Jakarta Selatan. Warga masyarakat Kelurahan Pasar Minggu pada awalnya terdiri dari warga etnis Betawi dan Arab, tetapi kemudian menjadi semakin heterogen, yaitu terdiri dari etnis: Madura, Jawa, Sunda,

Batak, Cina, Aceh, Padang dan etnis dari wilayah Timur Indonesia. Heterogenitas penduduk di Kelurahan Pasar Minggu ini juga tercermin dalam keanggotaan Mikro Kredit Gema Warga. Anggota Mikro Kredit ini bukan hanya dari etnis Betawi saja tetapi juga dari etnis-etnis lain seperti Jawa, Madura, Batak, Sunda dan masih banyak etnis lagi. Heterogenitas juga ditunjukkan dengan beranekaragamnya jenis usaha anggota Mikro Kredit, diantaranya sebagai tukang kredit, tukang ojeg, pedagang bakso, pedagang tempe, dan warung kecil. Dalam kehidupannya, komunitas tersebut dimudahkan juga oleh berbagai fasilitas, seperti: tersedianya fasilitas pendidikan, sarana transportasi, fasilitas perekonomian berupa pertokoan dan pasar.

Data sampai bulan Juli tahun 2002, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kelurahan Pasar Minggu adalah 28761 orang, terdiri dari 5427 kepala keluarga dengan 15735 orang laki-laki dan 13026 orang perempuan. Dari jumlah tersebut, yang bergabung menjadi anggota Mikro Kredit baru 16 kelompok dengan anggota berjumlah 192 orang, terdiri dari 38 orang laki-laki dan 154 orang perempuan, dengan tingkat kesejahteraan anggota sebagian besar berada pada tingkat KS (keluarga sejahtera) sebanyak 147 orang dan 45 orang berada pada tingkat Pra keluarga sejahtera (Pra KS). Meskipun dari data, anggota yang termasuk dalam Pra KS hanya 45 orang, ternyata hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa sebenarnya angka Pra KS lebih dari 45 orang.

Berdasarkan pengamatan, konsentrasi penduduk miskin terdapat di RW 01, RW 02, RW 03, RW 07 dan RW 10, meskipun di semua RW juga ada penduduk miskin. Selain itu ada konsentrasi penduduk miskin yang ternyata tidak menerima bantuan program PDM-DKE, yaitu yang terdapat di RT 11 / RW 01, dan RT 02 / RW 02. Mereka adalah penduduk yang menempati rumah semi permanen dan gubug di tanah negara melalui sewa kepada orang yang lebih dulu tinggal di tempat tersebut. Warga yang betul-betul miskin ini tetap tidak bisa melepaskan kemiskinannya karena tidak bisa mengakses ke bantuan seperti JPS (PDM-DKE, JPS-BK dll) karena kebanyakan tidak mempunyai kartu tanda penduduk (KTP).

Belajar dari kegiatan kredit mikro sebelumnya, maka sasaran dari kegiatan mikro kredit, sebagian besar mempunyai pekerjaan sebagai pedagang dan ibu rumah tangga. Pemberian pinjaman modal usaha Mikro Kredit kepada mereka ini merupakan suatu upaya untuk mengangkat harga diri pedagang kecil dan ibu rumah tangga yang

selama ini dianggap sebagai kaum pinggiran (komunitas marginal) dalam kehidupan masyarakat ke tempat yang lebih layak dan lebih dihargai oleh komunitasnya. Pemfokusan sasaran ini sejalan dengan upaya meningkatkan daya beli komunitas sekaligus juga menjaga kelangsungan usaha ditengah situasi krisis yang tidak kunjung berakhir.

Ketidakberdayaan komunitas marginal ini juga ditunjukkan dalam penempatan warga miskin biasa tinggal di lahan-lahan kosong yang oleh pemiliknya tidak dikelola atau juga menyewa lahan tersebut dengan konsekuensi sewaktu-waktu dapat digusur. Bahkan ada juga diantara mereka yang tinggal di atas tanah negara yang bukan diperuntukkan untuk mendirikan bangunan. Sebagai contoh kasus, Bu MS yang merupakan pendatang dan tinggal di RW 01, menyatakan bahwa semula ia mengontrak rumah akan tetapi karena biaya kontrakan mahal, maka ia mencoba mendirikan bangunan sederhana di atas tanah negara. Perubahan juga banyak terjadi pada warga Betawi yang semula merupakan pemilik lahan tetapi karena sikap dan perilaku yang tidak produktif menjadikan mereka melepaskan lahan tersebut dijual kepada warga pendatang yang ternyata lebih produktif. Hal inilah yang menjadikan warga Betawi asli semakin terpinggirkan oleh pendatang.

Ikatan sosial di antara warga di lingkungan RT dan RW pada umumnya cukup kuat. Ini terlihat dari adanya kelompok-kelompok pengajian, kelompok-kelompok arisan yang membuat mereka menjadi lebih kenal dan akrab satu sama lain. Kesamaan kepentingan dan kebutuhan menjadikan mereka berkelompok (bersinergi) dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi pengelompokan ini juga merupakan strategi untuk mengatasi kesulitan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup, di mana mereka bisa saling memberikan dukungan dan pertolongan. Dukungan antar warga diwujudkan dalam bentuk materi dan non materi, seperti memberikan bantuan/sumbangan seikhlasnya pada saat melawat dan menghibur keluarga yang terkena musibah (sakit atau meninggal dunia). Demikian juga pada saat ada kelahiran, selamat atau pesta khitanan dan pesta perkawinan. Dukungan juga diberikan dalam bentuk pemberian kesempatan bekerja pada sesama pendatang yang berasal dari satu daerah sehingga ditemukan kelompok usaha ekonomi yang sejenis. Contohnya pendatang dari Pekalongan mempunyai usaha sebagai pedagang tempe, dari Madura menjadi pedagang ikan, dari Pati menjadi pedagang sayur, dari Tasikmalaya menjadi tukang kredit, dan

pendatang dari Wonogiri menjadi tukang mie bakso dan jamu gendong. Di antara mereka saling membantu mencari pekerjaan, memberikan bantuan modal, dan sekaligus mengajari cara bekerja.

Dalam Kelembagaan Mikro Kredit, anggota juga mengakui adanya pemimpin-pemimpin atau tokoh masyarakat yang menjadi acuan bagi masyarakat umum dalam bersikap maupun berperilaku, menjadi tempat mengadukan permasalahan hidup dan mencari solusinya. Pemimpin atau tokoh masyarakat ini ada yang kesehariannya bekerja sebagai aparat pemerintah, sebagai ulama, sebagai pedagang/pengusaha, dan ada juga yang pensiunan baik PNS maupun ABRI. Masyarakat menganggap orang-orang tersebut menjadi pemimpin atau tokoh masyarakat karena melihat kecakapan atau kemampuan, melihat kekayaan, dan juga faktor keagamaan.

Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Pasar Minggu membentuk kelompok-kelompok dan melembagakannya dalam kehidupan bermasyarakat. Secara umum kelompok dan kelembagaan yang ada di Kelurahan Pasar Minggu dapat dibedakan menjadi dua, (1) Kelompok tradisional. Kelompok ini berbentuk beranekaragaman, pengajian, majelis taklim, perkumpulan seni, perkumpulan olah raga. Besarnya anggota kelompok ini bervariasi berkisar antara 10 orang sampai 40 orang dengan cakupan RT, antar RT, atau RW bahkan gabungan RW. Mereka belum mempunyai struktur organisasi yang formal, yang ada non formal yaitu dalam bentuk sesepuh atau orang yang dituakan untuk memimpin kelompok. Meskipun masyarakat Pasar Minggu sangat heterogen, tetapi karena ikatan kepentingan menjadikan mereka erat dan aktif dalam berbagai kegiatan kelompok. Aturan dalam kelompok ini tidak ditemukan secara tertulis tetapi anggota kelompok telah mengetahui dari perjalanan pengalamannya dalam kelompok. Masing-masing anggota mengetahui kegiatan kelompok karena merupakan rutinitas yang tidak direncanakan secara khusus dan dalam kegiatannya juga jarang sekali dilakukan pengadministrasian kegiatan yang rapi. Dari kelompok-kelompok tradisional inilah awal kegiatan Mikro Kredit bergulir. Proses sosialisasi kegiatan Mikro Kredit ketika itu disampaikan secara bertahap dalam forum-forum yang diadakan oleh kelompok-kelompok tradisional. Langkah ini cukup efektif terbukti dengan semakin luasnya jangkauan kegiatan Mikro Kredit. (2) Kelompok Formal, merupakan lembaga yang dibentuk secara resmi oleh pemerintah dalam rangka menjalankan roda pemerintahan di kelurahan. Termasuk dalam kelompok kelembagaan

formal ini adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kota (LKMD/K), sekarang ada Dewan Kelurahan (DEKEL). Mereka mempunyai tugas untuk merencanakan pembangunan yang dilaksanakan atas dasar musyawarah, menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan segala potensi yang ada, serta menumbuhkan dan menciptakan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan ketahanan masyarakat di kelurahan. Keanggotaan lembaga ini merupakan perwakilan seluruh warga masyarakat sehingga heterogenitasnya cukup tinggi sesuai dengan karakteristik masyarakat kelurahan Pasar Minggu. Dalam kenyataannya LKMD/K ini tidak bisa berfungsi secara baik, dan tidak mampu menjalankan tugas dan peranannya dalam kehidupan. Hal ini disebabkan kekuasaan yang terlalu dominan di tangan lurah, di samping juga keterbatasan sumber daya manusia anggota LKMD/K (seperti kurangnya wawasan pengetahuan, kurangnya kemampuan manajerial, dan kurangnya legitimasi masyarakat terhadap keberadaannya di LKMD/K atau dapat dikatakan mereka tidak mengakar pada masyarakat), dan juga ketidakmampuan LKMD/K membawa aspirasi masyarakat menjadi suatu kenyataan pembangunan.

Meskipun terlihat bahwa kelompok tradisional dan kelompok formal menjalankan tugasnya tetapi dari pengamatan diketahui bahwa komunikasi/interaksi kedua kelompok tersebut kurang. Hal ini menyebabkan tiap kelompok menjalankan kegiatannya sendiri-sendiri. Padahal kelompok formal (baca ; pemerintah) dan kelompok tradisional sangatlah saling membutuhkan. Pemerintah tanpa partisipasi masyarakat akan menyebabkan tujuan program tidak tercapai, demikian pula program kelompok tradisional tanpa dukungan pemerintah juga menjadikan tujuan tercapai tidak optimal. Di sinilah diperlukan adanya mediator yang mampu menyelaraskan kedua pihak, mampu menjembatani kepentingan kedua pihak. Sekarang ini yang mengambil peran tersebut adalah lembaga swadaya masyarakat. Beberapa LSM yang bekerja di wilayah Kelurahan Pasar Minggu mencoba untuk membentuk proses pembangunan masyarakat dalam kerangka partisipasi masyarakat. Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah pembentukan FORWALI (Forum Warga Peduli) dalam kegiatan Mikro Kredit.

Forwali adalah suatu forum (acara) yang merupakan wadah pemberdayaan “politik” warga. Dalam hal ini warga dimotivasi untuk dapat menumbuhkan dan

meningkatkan partisipasinya dalam aspek perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pengevaluasian sehingga tercapainya tujuan pembangunan. Secara operasional forum ini mewadahi keinginan, gagasan, ide masyarakat melalui wakil-wakilnya (warga peduli) yang hadir pada forum tersebut untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh warga sekitarnya, termasuk permasalahan yang dialami oleh Mikro Kredit.

Evaluasi Kegiatan Mikro Kredit

Salah satu ciri mendasar dari suatu kegiatan pengembangan masyarakat yang dijalankan dalam kerangka “pemberdayaan” adalah adanya keberlanjutan kegiatan pembangunan (*sustainable development*). Suatu kebijakan kegiatan pengembangan masyarakat bukan hanya direncanakan secara matang agar kegiatan tersebut berkesinambungan, tetapi suatu kebijakan juga merencanakan dan mengaplikasikan sistem evaluasi untuk memformulasikan kembali kegiatan tersebut agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pengembangan masyarakat.

Evaluasi kegiatan pengembangan masyarakat juga dimaksudkan untuk mengkaji sejauh mana program tersebut telah berbasis komunitas. Ciri utama suatu program telah berbasis komunitas adalah manakala program tersebut mampu mengembangkan modal sosial dan jejaring sosial, mampu mengembangkan forum inisiasi publik dan mengimplementasikan asas partisipatif, dan terakhir program tersebut mampu mengembangkan jejaring usaha produktif dan jejaring kolaboratif dalam upayanya mencapai tujuan.

Hasil evaluasi kelembagaan dan modal sosial pada kegiatan pengembangan masyarakat di Kelurahan Pasar Minggu dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan program-program pengembangan masyarakat sebelumnya tidak didukung oleh partisipasi warga dalam setiap tahapan kegiatan karena (1) Kondisi krisis yang menimpa warga telah membuat warga tidak memikirkan proses belajar, tetapi lebih mementingkan kebutuhan hidup yang mendesak. (2) Rancangan program tidak memberikan ruang bagi warga untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan kegiatan., (3) Kurang adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. (4) Kurang tersosialisasinya program sehingga banyak masyarakat ramai-ramai mengajukan pinjaman tetapi mereka tidak siap untuk mengisi proposal, mereka bingung dengan berbagai prosedur yang ada.

Secara keseluruhan, kegiatan pengembangan masyarakat selama ini belum mampu mengembangkan kelembagaan dan memanfaatkan modal sosial. Pengembangan modal sosial sebagai suatu upaya membentuk jaringan sosial kurang mendapatkan porsi dalam kegiatan pemberdayaan tersebut. Padahal menurut Portes (1998), jaringan sosial bukanlah sesuatu yang alamiah melainkan harus dikonstruksikan melalui penentuan strategi yang berorientasi pada hubungan-hubungan kelembagaan dalam kelompok.

Untuk lebih mendalami beberapa kelebihan dalam pelaksanaan kegiatan mikro kredit dapat dilihat dari pendekatan modal sosial, diantaranya: 1) Aspek kepemimpinan komunitas, pengelola kegiatan dipilih atas dasar peran tokoh pemimpin informal yang memiliki kemampuan memimpin, kejujuran, dan tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugas, sehingga tercipta kepercayaan (*Trust*) bagi anggota maupun masyarakat. Hal ini berbeda dengan kebiasaan lama yang seringkali pengelola program pengembangan masyarakat telah ditetapkan oleh juklak dan juknis dari atas. 2) Aspek Dana Komunitas Program Gema Warga mempunyai sistem yang membuat saling membantu sesama anggota masyarakat melalui dana sosial, dan dana tanggung renteng. 3) Aspek sumber daya material, Kegiatan pengembangan masyarakat memerlukan adanya fasilitas kerja kantor sekretariat dan perlengkapan kantor lainnya baik milik sendiri maupun mengontrak sehingga mempermudah pelaksanaan kegiatan. 4) Aspek pengambilan keputusan. Dalam Gema Warga, keputusan diambil melalui musyawarah yang diadakan oleh setiap kelompok masyarakat, dan bila ada permasalahan yang besar maka dibahas dalam forum komunikasi warga yang melibatkan seluruh stake holder. 5) Aspek organisasi komunitas. Pada Gema Warga, Ikatan anggota erat karena dibiasakan aktif dalam setiap kegiatan kelompok sehingga muncul tanggung jawab sosial. Anggota selaluikutsertakan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjutnya. 6) Aspek Pengetahuan komunitas. Pada Gema Warga Masyarakat terlibat dalam membuat program sehingga lebih menjiwai dan merasa memiliki program. Ini membantu menumbuhkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam kegiatan.

Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa motivasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat GEMA WARGA masih sebatas untuk mendapatkan dana bantuan bagi pemenuhan kebutuhan hidup pokok. Ungkapan “yang penting dana cair” menjadi wakil bagi motivasi mereka dalam kehidupan yang sulit akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Motivasi ini menyebabkan mereka

cenderung bersikap negatif dan menganggap kegiatan pengembangan masyarakat sebagai suatu kegiatan bantuan cuma-cuma, dana hibah dari pemerintah yang tidak harus dikembalikan.

Pengembangan Modal Sosial dan Jejaring Sosial Kelembagaan Mikro Kredit

Pembahasan mengenai pengembangan modal sosial dan jejaring sosial tidak terlepas dari keberadaan kepemimpinan lokal, dana komunitas, kepercayaan masyarakat (*trust*), keberadaan kelompok-kelompok lokal dan sebagainya. Hasil wawancara terhadap anggota Mikro Kredit menunjukkan bahwa berkaitan dengan pemanfaatan kepemimpinan lokal dalam masyarakat, kelompok sasaran menganggap bahwa yang dimaksud dengan tokoh masyarakat (sebagai orang yang dianggap menjadi pemimpin lokal dan dianggap sebagai orang sukses) adalah mereka yang dianggap mempunyai pengalaman di masyarakat, mampu membimbing kemasyarakatan, mengurus rakyat, bisa memimpin dan dapat dijadikan panutan masyarakat. Pemanfaatan kepemimpinan lokal dalam kegiatan Mikro Kredit ini dapat dilihat dari keterlibatan tokoh masyarakat menjadi pemberi persetujuan bagi peminjam baru kegiatan mikro kredit, menjadi penjamin sebagai anggota Mikro Kredit.

Ikatan sosial yang erat diantara anggota kelompok-kelompok sosial tersebut dilandasi oleh kepercayaan (*trust*). Relasi erat sesama anggota kelompok dan juga kepemimpinan orang sukses, menjadikan mereka saling membantu, saling berbagi sehingga ada proses timbal balik. Hal ini merupakan dasar bagi adanya modal sosial dalam masyarakat. Dari kesamaan etnis dan peranan orang sukses mereka membentuk kesepakatan-kesepakatan tak tertulis untuk menjadi pedoman perilaku mereka, menjaga keutuhan persatuan diantara anggota kelompok, melakukan pengawasan sosial dan yang lebih utama lagi adalah upaya bersama untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Salah satu aspek penting dalam pemanfaatan modal sosial adalah kepercayaan warga masyarakat terhadap kegiatan mikro kredit. Hasil wawancara menunjukkan bahwa awalnya mereka menjadi anggota mikro kredit. disebabkan dua hal: (1) Adanya kondisi saling percaya dalam kehidupan para anggota Mikro Kredit (2) Kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan Mikro Kredit dirasakan dapat menolong usahanya dikarenakan syaratnya yang ringan dan tidak berbelit-belit. Di samping itu kepercayaan juga timbul karena penjelasan informasi kegiatan Mikro Kredit disampaikan juga oleh

tokoh masyarakat atau pemimpin lokal mereka, serta didukung oleh informasi dari orang yang telah bergabung lebih dulu.

Di samping pemanfaatan kepemimpinan lokal dan kepercayaan masyarakat, pemanfaatan dana komunitas juga menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan modal sosial. Dalam setiap komunitas pada umumnya tersedia dana atau juga mempunyai potensi dana yang besar, tetapi belum dapat dimanfaatkan. Demikian juga dengan masyarakat di Kelurahan Pasar Minggu. Wawancara dengan kelompok sasaran kegiatan Mikro Kredit menunjukkan bahwa mereka menyatakan kegiatan Mikro Kredit bisa menggali dana yang ada dalam masyarakat. Caranya adalah dengan membuat suatu sistem perekonomian dimana masyarakat menjadi anggota. Pelaksanaan sistem ini adalah dengan pemberian pinjaman kecil (mikro kredit) dengan setoran yang lancar dan menuju pada pembentukan lembaga ekonomi produktif (koperasi). Di samping itu penggalian dana masyarakat dilakukan melalui dana sosial yang digunakan oleh anggota Mikro Kredit untuk pembentukan klinik. Dalam pelaksanaan klinik ini melibatkan warga masyarakat, contohnya masyarakat dilibatkan dalam tahap perencanaan, dan mensepakati biaya untuk pengobatan.

Pengembangan modal sosial sudah seharusnya menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan Mikro Kredit sudah berada dalam kerangka pengembangan modal sosial, karena: (1) Adanya Sistem yang digunakan merupakan kesepakatan diantara masyarakat sasaran (2) Sasaran merupakan kelompok-kelompok lokal yang telah ada pada masyarakat, (3) Adanya mekanisme yang melatih warga untuk menabung, Adanya sistem yang menjamin sesama anggota saling membantu apabila mengalami kesusahan dalam hidup, yaitu Dana Sosial dan Dana Tanggung Renteng. Meskipun demikian tampak bahwa keberlanjutan kegiatan masih dirasakan sukar dilakukan karena ketergantungan yang tinggi pada sumber dana.

Interaksi yang saling mendukung dalam kelompok-kelompok sosial pada kelembagaan Mikro Kredit merupakan modal sosial yang belum dimanfaatkan secara optimal dalam pelaksanaan kegiatan mikro kredit ini, walaupun sikap saling membantu, saling menolong ini masih banyak yang menonjolkan sisi etnis atau simbol-simbol kelompok masing-masing dan belum melintas antar kelompok-kelompok sosial tetapi

kalau diarahkan pasti akan terwujud kekuatan untuk membangun masyarakat yang lebih baik.

Analisis Kekuatan dan Kelemahan Kelembagaan Mikro Kredit

Untuk melihat sejauh mana kelembagaan Mikro Kredit telah berbasis komunitas, kita bisa menganalisisnya dengan menggunakan analisis kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang dimiliki kelembagaan Mikro Kredit dalam upaya menjadi kelembagaan yang berbasis komunitas diantaranya: (1) Posisi sosial kelembagaan Mikro Kredit yang strategis, yaitu dekat dengan berbagai fasilitas ekonomi, transportasi, pendidikan, dan pemerintahan. Posisi ini memberikan kemudahan bagi anggota Mikro kredit dalam mengembangkan usaha produktifnya dan menjalin kerja sama usaha dengan pihak lain. (2) Banyak kelompok-kelompok lokal masyarakat. Keberadaan mereka ini merupakan kekuatan bagi kelembagaan Mikro Kredit dalam upaya menangani masalah golongan miskin perkotaan. Kelembagaan Mikro Kredit tidak perlu lagi membangun kelompok dari awal karena selama ini masyarakat Pasar Minggu sudah terkumpul dalam kelompok-kelompok lokal. (3) Adanya kepercayaan (*trust*) dan ikatan sosial yang kuat dari masyarakat. Kepercayaan masyarakat merupakan suatu modal sosial yang sulit untuk didapatkan mengingat seringkali mereka mengalami kekecewaan terhadap program pembangunan yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Menjaga kepercayaan masyarakat merupakan hal penting bagi upaya memobilisir partisipasi masyarakat dalam kegiatan Mikro Kredit. Ikatan sosial yang kuat ditengah masyarakat juga merupakan modal sosial yang kuat untuk membangun kebersamaan dan menggerakkan partisipasi aktif masyarakat. (4) Adanya dana sosial, dana tanggung renteng dan simpanan pokok dalam kelembagaan Mikro Kredit. Mekanisme ini mendorong anggota Mikro Kredit untuk mempunyai tanggung jawab sosial, mendorong kebersamaan dan mendorong anggota untuk memikirkan kehidupan masa depannya. (5) Adanya kegiatan klinik kesehatan. Keberadaan klinik kesehatan di samping kegiatan mikro kredit sangat mendukung terbentuk kelembagaan yang berbasis komunitas. Salah satu kelebihan program Gema Warga ini adalah bervariasinya kegiatan sehingga masyarakat merasa terlayani kebutuhan hidupnya. (6) Adanya forum komunikasi warga (FKW) yang merupakan bentuk dari pembelajaran politik warga seperti yang disebutkan oleh Endriatmo Soetarto (2002) sebagai “ruang sosial semi otonom”.

Di samping kekuatan, upaya kelembagaan Mikro Kredit menjadi lembaga yang berbasis komunitas juga mengalami hambatan yang merupakan kelemahan. Kelemahan itu diantaranya: (1) Kurangnya keterlibatan tokoh masyarakat. Keberadaan tokoh masyarakat sebenarnya merupakan modal sosial yang harus dimanfaatkan kelembagaan Mikro Kredit. Tokoh masyarakat merupakan orang yang mampu secara efektif dan efisien menyampaikan informasi kepada masyarakat, mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan, tetapi keberadaan mereka selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, apalagi tokoh-tokoh formal yang berada pada jajaran aparat pemerintah daerah seperti Lurah, RT, RW dan lainnya. Selama ini mereka hanya terlibat dalam tahap awal yaitu sosialisasi program/kegiatan sedangkan pada tahap pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjutnya terkesan ditinggalkan. (2) Hambatan komunikasi antara pengelola dengan anggota dan dengan stakeholder lain kadang menyebabkan kesalahpahaman. (3) Keterlambatan pembayaran angsuran. (4) Kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam proses evaluasi kegiatan Mikro Kredit. (5) Keterbatasan kemampuan masyarakat dalam menyampaikan pendapat menyebabkan keputusan seringkali didominasi oleh sekelompok kecil orang. (6) Ketergantungan yang tinggi terhadap sumber donor/dana pinjaman Mikro Kredit. (7) Kelembagaan Mikro Kredit belum berbadan hukum, hal ini menyebabkan terhambatnya proses kerjasama dengan pihak lain. (8) Kurangnya dana komunitas (9) Kurang optimalnya pemanfaatan kelompok lokal masyarakat.

Kelemahan lain yang dimiliki oleh kelembagaan Mikro Kredit adalah berbentuk ancaman, seperti: (1) Potensi terjadinya konflik sosial yang besar pada anggota Mikro Kredit sehubungan dengan keanekaragaman anggota yang berasal dari berbagai etnis, jenis pekerjaan, dan lokasi tempat tinggal. (2) Penentuan aturan main dalam kegiatan mikro kredit yang masih didominasi oleh beberapa orang saja (pengelola, ketua kelompok dan anggota yang aktif) atau lebih sering disebut dengan *activist bias* (3) Rencana penarikan dana bergulir dari lembaga donor, merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan pelaksanaan kegiatan Mikro kredit mengingat ketergantungan yang masih tinggi dari kelembagaan Mikro Kredit terhadap sumber donor.

PENUTUP

Pengembangan kelembagaan Mikro Kredit, dilakukan dengan tujuan akhir meningkatnya kesejahteraan hidup golongan miskin perkotaan. Untuk itu perlu dilakukan strategi menjadikan kelembagaan Mikro Kredit sebuah lembaga yang berbasis komunitas dengan cara: (1) Mengembangkan modal sosial dan jejaring sosial (kelembagaan) berbasis komunitas. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan kepemimpinan lokal dalam masyarakat, menggalang dan memanfaatkan dana komunitas, menggalang dan memanfaatkan sumber daya material, meningkatkan pengetahuan komunitas, memanfaatkan teknologi komunitas, memperbaiki proses pengambilan keputusan dan meningkatkan organisasi komunitas. (2) Mengembangkan forum inisiasi publik dan mengimplementasikan asas partisipatif dalam kelembagaan Mikro Kredit. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan lembaga, dan meningkatkan kegiatan forum-forum warga. (3) Menyusun program jejaring usaha produktif dan jejaring kolabratif untuk menangani masalah golongan miskin. Kegiatan yang dilakukan dalam hal ini adalah meningkatkan usaha produktif yang dikelola oleh warga masyarakat, meningkatkan lembaga pelayanan sosial, dan meningkatkan jaringan usaha dengan sistem sumber lain baik pemerintah maupun swasta.

Untuk keberhasilan pelaksanaan Program Penanganan Golongan Miskin Perkotaan Melalui Pengembangan Kelembagaan Mikro Kredit Berbasis Komunitas, maka perlu dipahami bersama bahwa untuk mendapatkan kinerja yang bagus dalam penanganan golongan miskin perkotaan melalui pengembangan kelembagaan Mikro Kredit yang berbasis komunitas, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Karakteristik Lokal, Karakteristik lokal ini meliputi kondisi demografis, kondisi geografis, kondisi sosial budaya dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dengan memperhatikan karakteristik lokal ini kita mampu mengenali masalah, potensi dan sekaligus sistem sumber yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan masyarakat. Melalui pendekatan ini suatu program akan mendapatkan dukungan partisipasi aktif warga karena program yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan warga. Hal ini akan mengurangi kesenjangan antara harapan warga dengan program yang ada sehingga program akan efektif, efisien untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan warga masyarakat. 2) Komprehensif. Suatu program pengembangan masyarakat akan lebih

berhasil manakala dilaksanakan secara komprehensif. Komprehensif berarti suatu program merupakan upaya untuk membangun sikap dan perilaku warga yang baik bukan hanya dalam bidang ekonomi saja tetapi juga menyangkut bidang politik, dan sosial budaya. Pengembangan di bidang ekonomi harus disertai dengan upaya membangkitkan kesadaran masyarakat di bidang politik, dan juga sosial budaya. Kesadaran politik warga tercermin dari terbentuknya semangat demokrasi, partisipasi aktif, transparansi, dan akuntabilitas publik. 3) Berkesinambungan. Berkesinambungan/keberlanjutan berarti setiap program pengembangan harus berjalan terus-menerus. Setiap program harus senantiasa dievaluasi dan ditindaklanjuti kembali. Dengan demikian suatu tata nilai/pranata sosial/kelembagaan sosial/sosial institution yang baik sebagai hasil proses pengembangan masyarakat dapat dilembagakan dan menjadi acuan bagi kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Luce.2002. Technology of Participation.Bahan Workshop Community Organizing Program IPGI. Bandung.
- Anderson Stephen K.. 2000. Makro Sosiologi, Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial edisi kedua. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Asian Development Bank.2000.Pendekatan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Partisipatif, dalam Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah. Republik Indonesia.
- Conyers, Diana. 1991. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar. Gajah Mada University.Yogyakarta.
- Dams, Theodor, 1980. "Development from below and people's participation as key principle of integrated rural development" Dalam summary report of the international research seminar on the Saemaul Undong Studies, Seoul, National University. Seoul.
- Gunardi, Sarwo Prasodjo, Sarwititi, 2002. Pengantar Pengembangan Masyarakat. Jurusan Ilmu-ilmu sosial ekonomi pertanian IPB dan Program Pasca Sarjana IPB. Bogor.
- Irawan Pugu B., 2001, Anti Poverty Programs In Indonesia, Analysis, Prospects and Policy Recommendations, BPS Indonesia, BAPPENAS, UNESCAP.
- Jelinek dan Rustanto 1999, Survive Strategis of the javanes during the conomicn crisis, Worl bank, Januari
- John F. Jones, Toshihiro Yogo, 1994, New Trainning Design for Local Sosial Development, Unites Nations Centre for Regional Development.
- Koentjaraningat, 1990, Sejarah Teori Antropologi, UI Press, Jakarta
- Moser, Caroline, 1988,Memenuhi Kebutuhan Praktis dan Kebutuhan Strategis Gender. dari, Pergamon Press. Vol. 17 No. 11, 1799-18250.
- Nasoetion, Lutfi Ibrahim. 1990. Suatu Alternatif Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Melalui Integrasi Perencanaan Pembangunan yang bersifat Bottom up dengan Top Down. Makalah disampaikan pada

- seminar sehari Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pedesaan, Diselenggarakan oleh GAKARI, di Bogor, tanggal 11 Januari 1990.
- Nuraini W. Prasodjo, Ida Yuhana F. Tonny, 2003, Pengelolaan Konflik Sosial, Magister Profesional Pengembangan Masyarakat IPB Bogor
- Nurmala KH. Pandjaitan, Ida Yuhana F. Tonny. 2003. Psikologi Sosial untuk Pengembangan Masyarakat, Magister Profesional Pengembangan Masyarakat IPB Bogor.
- Portes, Alejandro, 1998, Sosial Capital: It Origins and Applications in Modern Sociology, New Jersey: Annual Review Sosial page 1-240.
- R. Bintarto, 1986, Urbanisasi dan Permasalahannya, Ghalia Indonesia Jakarta
- Rustanto Bambang. 2002. Metode Partisipatory Assesment dan Rencana Tindak Lanjut (MPA-Action Plan) Dalam Pengembangan Masyarakat. Bahan Pelatihan Community Organizing YPM Kesuma Multiguna. Jakarta.
- Soetarto Endriatmo, Satyawan Sunito. 2003. Administrasi Pembangunan Daerah, Magister Profesional Pengembangan Masyarakat IPB Bogor.
- Suparlan Parsudi, 1995, Kemiskinan Perkotaan, YIS, Jakarta
- Susilawati, Isep Sepriyan, 2000, Dinamika Hubungan Antara Kelompok Tradisional, LKMD/K, dan Institusi Pengentasan Kemiskinan, DFID British Embassy-YPM Kesuma Multiguna Jakarta.
- Syukur Mat. 2002. Analisis Keberlanjutan dan Perilaku Ekonomi Peserta SKIM KREDIT Rumah Tangga Miskin. Program Pascasarjana IPB. Bogor.
- Tabloid Bangun Edisi 5, 2003, Hak Politik Warga Menjelang Pemilu, YPM Kesuma.
- The British Council. 2001. Mewujudkan Partisipasi, 21 Teknik Partisipasi Masyarakat Untuk Abad 21. New Economic Foundation.
- Tonny Fredian, Bambang S. Utomo. 2003. Pengembangan Kelembagaan dan Modal Sosial, Magister Profesional Pengembangan Masyarakat IPB Bogor.
- Woolcock, M, 1997, Sosial Capital and Economic Development: A Critical Review. Theory and Society, forthcoming.